









































































tersebut seseorang harus terlebih dahulu memiliki akhlak yang mulia. Dalam berpolitikpun Tarekat Shiddiqiyah memiliki pandangan tersendiri bagaimana caranya akhlak menjadi acuan dalam merumuskan sebuah kebijakan, berperilaku dalam menjalankan kekuasaan.

Etika politik dimaksudkan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta dapat memunculkan suasana politik yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Politik yang dapat memberikan rasa tanggungjawab, tanggap pada aspirasi masyarakat, peduli terhadap rakyat menengah bawah, jujur dalam persaingan, keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.<sup>55</sup> Etika pemerintah diharapkan dapat memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika politik yang sudah tertera pada hukum-hukum Pancasila atau tidak mampu memenuhi amanah masyarakat. Dimana hukum Pancasila sebagai ukuran dalam norma-norma dan nilai-nilai yang sudah ditentukan.

Pada prinsipnya segala aktifitas keseharian manusia dapat dikatakan sebagai suatu etika, karena manusia itu makhluk sosial. Jadi etika dalam politik berarti bagaimana suatu aktifitas politik dilakukan secara wajar dan tidak melanggar moral. Demikian halnya dengan politik segala kehidupan merupakan politik. Sebagaimana halnya menurut Aristoteles yang mengatakan interaksi sosial sesama manusia itu tergolong politik maka hakikat politik dalam pandangan

---

<sup>55</sup> Wahyu Widodo, "Mewujudkan Budaya Politik Santun, Bersih dan Beretika dalam Rangka Memperkokoh Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Humanika*, Vol. 19 No. 1, (Semarang: Universitas PGRI, 2014), 118.





Dalam mewujudkan sistem etika yang tidak dilandasi dengan iman akan sulit terwujud. Karena itu merupakan modal bagi ketenangan jiwa sebelum seseorang melakukan sebuah tindakan tertentu. Dalam Islam iman merupakan fitrah dan kebutuhan dasar manusia. Iman melahirkan tata nilai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terlihat jika Tarekat Shiddiqiyah juga sepakat bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sumber moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iman membangkitkan kesadaran manusia akan adanya pertanggungjawaban sepenuhnya kepada Allah bukan kepada sesama makhluk Allah. Dengan iman maka akan lahir kesadaran untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengingatkan tentang benar dan salah.<sup>61</sup>

Aristoteles juga sangat menekankan pentingnya moral dalam berperilaku dan kemampuan untuk mengetahui langkah terbaik yang perlu diambil. Aristoteles dalam karya etikanya mengurai tujuan manusia. Ia mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai tujuan dan tujuan yang ingin dicapai tidak lain hanyalah mencapai tujuan selanjutnya. Tujuan yang tertinggi adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesuai dengan kebaikan bukanlah sebuah kekayaan atau kesenangan. Kesenangan memang merupakan tujuan yang baik tetapi belum dapat dikatakan tujuan terakhir. Kebahagiaan muncul dari kegiatan-kegiatan manusia yang menggunakan fungsi akalnyanya dengan sebaik-baiknya. Kalau akal manusia dapat mengarahkan kehidupan maka tercapailah keunggulan manusia. Dalam hal inilah tercapainya sebuah kebahagiaan tersebut. Menurut Aristoteles manusia akan mencapai kebahagiaan apabila ia menjalankan aktivitas

---

<sup>61</sup> Faisal Baasir, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Jakarta: Sinar Harapan, 2003), 133.

























Shiddiqiyah melalui media sosialnya untuk tidak lagi mempercayai Rofi'i. Bahkan menarik semua buku-buku ajaran Shiddiqiyah dan tidak boleh kembali untuk mengikuti pengajian-pengajian khusus.<sup>77</sup>

Hal ini juga terjadi ketika salah seorang warga Shiddiqiyah berpolitik praktis. Dimana beliau merupakan pemimpin daerah di Kabupaten Jombang, tidak lain ialah Nyono Suharli yang masih belum dapat mewujudkan nilai-nilai etika politik yaitu nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena, kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kemaslahatan masyarakat. Diantaranya memenuhi hak rakyat atas fasilitas kesehatan, jalan raya, penambahan alat transportasi.

Melihat kenyataannya yang ada, hal ini terjadi pada warga Dusun Nampu, Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan, Jombang lantaran tidak ada satupun fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Sebanyak 126 jiwa yang tinggal di Dusun Nampu harus menempuh perjalanan selama dua jam untuk mendapatkan perawatan medis. Serta untuk keluar dari desanya saja sulit karena tidak ada akses jalan yang memadai. Jika warga yang sakit dan ibu hamil yang ingin melahirkan harus diangkut menggunakan tandu untuk bisa sampai ke PUSKESMAS. Banyak dari ibu hamil yang ingin melahirkan pada akhirnya meninggal dunia menahan rasa sakit. Selain itu, anak-anak yang di sekolah SMP dan SMA sudah tidak sekolah jika air sungai banjir karena harus menempuh perjalanan 15 kilometer dan tidak ada akses lain menuju sekolah. Dahulu warga setempat sudah mengajukan permohonan fasilitas kesehatan dan akses jalan terhadap pemerintah daerah akan

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Iin Muthmainah (Anggota aktif Organisasi Pemuda Shiddiqiyah Jombang), (Jumat, 31 Maret 2017, Pukul 20.33 WIB)



